

ARTIKEL

Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN)

Digital Transformation of Personnel Services in Cirebon City Local Government: Policy Case Study of Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN)

Citation: Hermawan, K. T., Pusparani, I. G., & Solihudin, D. (2023). Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN). *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>

Naskah Diterima: 5 Maret 2023

Naskah Disetujui: 17 Mei 2023

Naskah Diterbitkan: 31 Mei 2023

© Penulis



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci:

Transformasi Digital, Layanan Kepegawaian, Administrasi Pemerintahan, Aplikasi SAMPEAN, Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Kurnia Tri Hermawan  ¹, Indah Gilang Pusparani ², Dodi Solihudin ³

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon

³ Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

[✉ trihermawan.litbang@gmail.com](mailto:trihermawan.litbang@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan transformasi digital layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang layanan kepegawaian yang diperkuat dengan dukungan regulasi-regulasi. Berangkat dari kesulitan-kesulitan untuk layanan kepegawaian secara manual dalam sistem manajemen kepegawaian ASN yang berbasis kinerja, diluncurkanlah aplikasi SAMPEAN yang menjadi *dashboard* untuk seluruh informasi kepegawaian di Kota Cirebon. Informasi kinerja berupa presensi dan laporan kerja harian, dan perhitungan tambahan penghasilan pegawai yang semakin *real-time*, akurat, transparan, dan adil. Selanjutnya, dengan pengembangan kebutuhan akan kelengkapan aplikasi sekaligus penyederhanaan *platform*, pada tahun 2022, melalui kebijakan layanan administrasi pemerintahan berupa Perwal Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka aplikasi SAMPEAN bertransformasi dengan menambah layanan kepegawaian, kinerja, kearsipan, dan layanan pemerintahan lainnya. Keberadaan layanan aplikasi SAMPEAN yang bisa diakses langsung oleh pengguna (ASN) merupakan bentuk implementasi transformasi digital dalam kebijakan kepegawaian dan manajemen pemerintahan lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Abstract: *This paper aimed to examine how the personnel policy underwent a digital transformation in the government of Cirebon City Local Government. Using a descriptive-qualitative method, this paper discussed how the Cirebon City government implemented an electronic-based government system in personnel services that were strengthened by regulatory support. Following the difficulties of manual personnel services in a performance-based apparatus management system, the government launched an application as the dashboard for all employment information. Performance information namely attendance and daily performance report, and the calculation of an additional monthly allowance that was more real-time, accurate, transparent, and fair. Furthermore, with the growing need for comprehensive digital services and the simplification of the digital platform, through government administrative policy in 2022, through Cirebon Mayor Regulation Number 52 of 2022 concerning Integrated Electronic-Based Service Portals within the Regional Government of Cirebon City, the SAMPEAN app was transformed by featuring additional personnel services, performance services, archives, and general government services. The existence of SAMPEAN app which could be accessed by civil servant users was the implementation of digital transformation of personnel policy and government management within Cirebon City Local Government.*

Keywords: *Digital Transformation, Personnel Services, Government Administration, SAMPEAN Application, Cirebon City Local Government policy*

1. Pendahuluan

Saat ini terdapat kecenderungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kecenderungan untuk menggunakan teknologi ini sudah tidak dapat dihindarkan lagi, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki tujuan untuk membangun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, berintegritas, dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi (Nopriani & Rodin, 2020; Suparto & Habibullah, 2021). Menurut Nugraha (2018), pemerintahan berbasis digital elektronik diharapkan dalam meningkatkan pelayanan aparatur terhadap publik, efektivitas dan efisiensi internal organisasi pemerintahan, dan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan publik.

Proses pengembangan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik disebut pula telah mengalami transformasi digital. Proses transformasi digital dapat menghasilkan modifikasi dan inovasi budaya, proses bisnis, dan layanan pengguna agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju (Firdaus et al., 2021). Hal ini memungkinkan terciptanya pelayanan publik yang lebih mudah, birokrasi yang lebih sederhana, dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien (Maulana, 2022).

Dalam konteks Kota Cirebon, dengan adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang baik, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyusun arah dan kebijakan yang transformasi digital yang terpadu. Dalam hal ini, pengelolaan layanan kepegawaian diterapkan dalam rangka keterpaduan dan efisiensi SPBE pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon.

Pemda Kota Cirebon memiliki kebijakan Peraturan Wali (Perwal) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang termasuk di dalamnya portal untuk pelayanan publik dan portal untuk tata kelola pemerintahan. Khusus untuk layanan kepegawaian, Keputusan Wali (Kepwal) Kota Cirebon Nomor 100/Kep/404-DKIS/2022 tentang Penetapan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan sebagai Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Terintegrasi mengatur penggunaan aplikasi SAMPEAN. Layanan digital kepegawaian tersebut merupakan hasil pengembangan bertahap, mulai dari sistem manual, elektronik terbatas, hingga portal saat ini yang semakin dilengkapi berbagai fitur.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana kebijakan transformasi digital layanan kepegawaian di Kota Cirebon. Bila dibandingkan dengan layanan kepegawaian di daerah lain, di Pemda Kota Tegal penerapan Sistem Informasi Layanan *Online* Kepegawaian (SiNOK) berupa penggunaan aplikasi berbasis *android* (akses via handphone) untuk mengetahui data absensi/kehadiran harian pegawai (Habibullah & Ferawati, 2022). Hal ini memiliki kesamaan dengan aplikasi SAMPEAN Kota Cirebon yang berbasis *android*. Sementara itu, penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Pemda Kota Gunung Sitoli dimanfaatkan untuk layanan kepegawaian bagi ASN dalam mengurus data-data kepegawaian (Erni Yanti Telaumbanua et al., 2022). Hal ini memiliki kesamaan dengan aplikasi SAMPEAN Kota Cirebon yang juga memiliki fitur kepegawaian.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian *On Line* (SAPK *On Line*) di Pemda Kabupaten Karanganyar, pelayanan kepegawaian berupa pengajuan, peremajaan dan pemutakhiran data Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Haryono et al., 2018). Di Kota Cirebon, layanan kepegawaian kenaikan pangkat menjadi salah satu bagian fitur dari sistem informasi berbeda yaitu DIANTER (Dokumentasi Pelayanan Terintegrasi) yang terdiri dari SEPAKAT (Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat), DOCANG (Dokumen Cuti Antar Jaringan) dan DOLANBAE (Dokumentasi Pelatihan Berbasis Elektronik).

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan dengan aplikasi layanan kepegawaian di kabupaten/kota lain, menunjukkan bahwa layanan kepegawaian sebatas berupa data kehadiran harian dan data kepegawaian ASN juga dimiliki oleh layanan kepegawaian SAMPEAN di Pemda Kota Cirebon. Sedangkan Aplikasi SAMPEAN memiliki fitur lebih

dari menu kepegawaian dan menu kinerja karena ada tambahan fitur menu kearsipan, menu pemerintahan dan menu perekonomian. Publikasi mengenai hal ini masih terbatas sehingga penelitian ini memiliki kebaruan untuk mengangkat bagaimana layanan kepegawaian di Kota Cirebon bertransformasi secara digital. Transformasi digital lebih mudah terlihat lompatan kinerjanya dalam instansi yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (D. Saputra, 2018). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dalam hal transformasi digital kebijakan layanan kepegawaian, serta secara praktis untuk memberi analisis praktik-praktik baik yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial, memahami maknanya, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2020) Lokus dari penelitian ini adalah transformasi digital layanan kepegawaian pemerintah daerah Kota Cirebon. Berdasarkan metode ini, tahap-tahap penelitian yang dilakukan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014). Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka akan dokumen-dokumen dasar hukum, literatur akademis terkait, dan observasi mengenai transformasi digital layanan kepegawaian yang dilaksanakan di Kota Cirebon.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Manajemen ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung di negara Indonesia. Besarnya jumlah ASN perlu diimbangi dengan manajemen ASN yang terpadu (Kraft & Furlong, 2018). Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan mandat secara terperinci dan terhubung, mulai dari perencanaan formasi hingga masa pensiun ASN (Oktarina & Mustam 2018). Pada dasar hukum ini pula, dijelaskan asas-asas yang mendasari kebijakan dan Manajemen ASN, di antaranya yaitu efisiensi dan efektifitas (Asmoro, 2022).

Permasalahan dalam manajemen ASN dianggap akan mempengaruhi kinerja birokrasi dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik. UU ASN menekankan pada birokrasi berbasis kinerja atau performance based yang pada akhirnya akan mengarah pada pemerintahan yang dinamis dan lincah (Kurniawan et al., 2020). Sebagai contohnya, rekrutmen ASN baru mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi organisasi yang ramping. Promosi dilakukan atas pertimbangan prestasi ASN tersebut di jabatan sebelumnya. Mutasi dilaksanakan atas dasar kebutuhan pegawai dan latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai yang akan ditempatkan posisi baru. Dengan ASN yang profesional, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan secara profesional pula.

Perkembangan manajemen ASN yang berbasis kinerja juga tidak terlepas dari reformasi birokrasi, yang salah satu sarannya adalah peningkatan profesionalisme ASN dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024 yang disusun oleh [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia \(2018\)](#), visi pembangunan ASN mencakup prinsip integritas, profesionalisme, beorientasi pelayanan, dan berkelas dunia (Smart ASN 2024) ([Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2019](#)). Smart ASN memiliki profil antara lain berintegritas, nasionalis, profesional, menguasai bahasa asing dan teknologi informasi, berjiwa kewirausahaan dan melayani, berjejaring secara luas dan berwawasan global ([Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2019](#)).

Pada praktiknya, untuk menghadapi birokrasi yang sesuai dengan tuntutan *Smart ASN* diperlukan kesiapan instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan teknologi informasi manajemen ASN. Proses manajemen ASN berbasis digital perlu dilakukan untuk pembangunan *Smart ASN* agar kinerja ASN dapat terukur secara objektif, memiliki rekam jejak digital, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Khaeromah et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan manajemen ASN perlu dilakukan agar birokrasi dapat menjalankan tugas pembangunan, tugas pemerintahan, dan tugas pelayanan publiknya (D. Saputra, 2018).

3.2. Kebijakan Administrasi Kepegawaian di Kota Cirebon

Administrasi kepegawaian berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Administrasi kepegawaian dapat dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pengarahan, hingga pengendalian sumber daya manusia dalam konteks organisasi tersebut (Anggara, 2016). Sementara itu, kebijakan kepegawaian dapat dipahami sebagai serangkaian aturan yang mengatur organisasi dan menjadi pedoman dalam mengadakan hubungan dengan seluruh tenaga kerja dalam organisasi tersebut (Anggara, 2016).

Kebijakan administrasi kepegawaian tidak terlepas dari kegiatan merumuskan kebijakan, memelihara keselarasan dan keserasian dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam konteks organisasi pemerintahan, birokrat memiliki peran penting dalam mengambil beragam keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat umum dan instansi pemerintahan itu sendiri (T. Saputra et al., 2016). Melalui kebijakan kepegawaian, maka ada petunjuk yang menjadi pedoman kegiatan dan kinerja bagi segenap pegawai. Penerapan kebijakan administrasi kepegawaian berkaitan erat dengan instansi yang bersangkutan, keseluruhan kondisi pegawai, peraturan perundang-undangan, serta gagasan manajemen kepegawaian dari para pemangku kepentingan. Kebijakan kepegawaian ini bersifat memiliki cakupan yang luas, memiliki jangka waktu yang lama, melibatkan banyak aktor, serta mengandung risiko yang besar (Haryono et al., 2018).

Pengelolaan pegawai yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon dalam upaya transformasi layanan administrasi kepegawaian, meliputi perumusan kebijakan, perencanaan layanan kepegawaian hingga pelaksanaan kebijakan, tidak lepas dari acuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukanlah penerapan sistem informasi administrasi kepegawaian yang berbasis elektronik (Suharno et al., 2020).

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon (2022), Pemda Cirebon merujuk pada regulas-regulasi yang telah dimandatkan di tingkat pusat untuk menyusun dasar hukum dasar hukum kebijakan administrasi kepegawaian berbasis digital, seperti UU ASN, PP tentang Manajemen PNS, Manajemen PPPK, SPBE, serta Perka Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pedoman Pengembangan *Data Base* Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, regulasi di tingkat daerah diatur dalam dasar hukum berikut ini: 1) Perwali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 2) Perwali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 3) Perwali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan 5) Kepwali Kota Cirebon Nomor 100/Kep.404-Dkis/2022 tentang Penetapan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan Sebagai Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Terintegrasi.

3.3. Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kepegawaian termasuk urusan pemerintahan unsur penunjang. Hal ini diartikan urusan kepegawaian melaksanakan fungsi-fungsi strategis yang mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Layanan kepegawaian menjadi salah satu tulang punggung tata kelola dan pelayanan publik pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan publik bagi ASN Pemda Kota Cirebon serta perlunya penyajian data yang akurat dalam rangka pengambilan keputusan maupun kebijakan terutama manajemen kepegawaian, perlu dilakukan suatu proses administrasi kepegawaian yang dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi seperti pembentukan sistem informasi manajemen kepegawaian. Pada era profesionalisme dalam manajemen seringkali menuntut adanya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara maupun kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Sirajuddin & Lestari, 2019).

Pemda Kota Cirebon melalui penetapan kebijakan Perwal Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Kepwal Kota Cirebon Nomor 100/Kep.404-DKIS/2022 tentang Penetapan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan Sebagai Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Terintegrasi telah menetapkan dan meluncurkan kepada publik Aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAMPEAN sebagai implementasi dari Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN.

Penggunaan sistem dalam layanan administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang penting. Sistem memiliki berbagai kegunaan seperti penyimpanan, pengumpulan serta penyaluran informasi yang diperlukan dalam organisasi maupun bidang lainnya. Proses kerja suatu sistem tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai unsur dalam rangka menghasilkan output sebagaimana diinginkan (Telaumbanua et al., 2020). Penggunaan sistem dalam layanan tentunya terkandung unsur pelayanan prima. Di dalam pelayanan yang prima (*service excellence*) terdapat empat unsur pokok yang terkandung seperti ketepatan, kecepatan, kenyamanan dan keramahan dimana merupakan satu kesatuan yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal (Mardesah & Zainal, 2021). Pelayanan publik perlu dievaluasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang terbaik sebagai wujud pelayanan prima (Ramadia, 2022).

Aplikasi SAMPEAN merupakan aplikasi berbasis *mobile* yang dapat digunakan oleh seluruh aparat di Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Implementasi aplikasi SAMPEAN sebagai Aplikasi layanan Administrasi Pemerintahan di Kota Cirebon diharapkan dapat mengintegrasikan data, informasi, serta layanan dalam administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Setiap Perangkat Daerah berperan sebagai pengelola layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian dalam penyediaan data, informasi dan penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Fungsi layanan administrasi pemerintahan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Transformasi Digital Aplikasi Layanan Kepegawaian

Menurut McGrath & Maiye (2010) dijelaskan bahwa transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke semua aspek kegiatan instansi, yang akan mengarah pada perubahan infrastruktur, operasi instansi, dan nilai tambah yang diberikan kepada penggunanya (O. A. Putri & Hariyanti, 2022). Menurut Zen Munawar (2018) bahwa dalam rangka proses transformasi digital diperlukan suatu keamanan data yang efektif dimana adanya analisis menyeluruh, proses implementasi, pemantauan dan pembaharuan. Lebih lanjut menurut Davis, Kee, & Newcomer (2010) bahwa

proses transformasi strategis melibatkan pengembangan visi, perencanaan strategis dan implementasi (N. I. Putri et al., 2021).

Penerapan Transformasi digital dapat dilakukan pada perubahan di tingkat industri maupun organisasi yang berupa inovasi digital. Transformasi digital mencakup proses digitalisasi dengan fokus pada efisiensi, dan inovasi digital dengan fokus pada peningkatan produk fisik yang ada dengan kemampuan digital (N. I. Putri et al., 2021). Transformasi digital bagi organisasi memiliki tujuan yang positif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Zen Munawar & Putri (2020), Transformasi digital turut mempengaruhi secara bersamaan terhadap aspek suatu organisasi. Selain itu pemangku kepentingan juga turut terlibat menentukan bagaimana strategi transformasi berjalan seperti pengembangan produk, strategi pemasaran, sumber daya manusia maupun dalam hal TI. Sehingga berbagai kelompok pemangku ini penting adanya pemahaman bersama tentang prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam transformasi digital (N. I. Putri et al., 2021).

Transformasi digital dalam layanan administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon merupakan fokus dalam penelitian ini, terutama berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Layanan kepegawaian pada Pemda dilakukan melalui SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) tersebut sudah berbasis elektronik namun hanya digunakan oleh pengguna tertentu sesuai tugasnya. Dengan kondisi tersebut yang masih terbatas bagi penggunaannya, kemudian terdapat inovasi Sistem Aplikasi *Mobile* Kepegawaian atau disingkat SAMPEAN. Aplikasi SAMPEAN mulai diluncurkan pada bulan Mei 2018 dan terus dikembangkan, dimana SAMPEAN merupakan *dashboard* data kepegawaian ASN Kota Cirebon. Melalui aplikasi tersebut, dapat digunakan oleh semua ASN Pemerintah Daerah Kota Cirebon guna mengetahui data kepegawaiannya dan data absensi.

Transformasi digital pada layanan kepegawaian di Kota Cirebon ini muncul manakala informasi dan data kepegawaian yang sebelumnya ASN tidak dapat mengakses datanya sendiri di SIMPEG, saat ini ASN yang bersangkutan sudah dapat mengakses informasi kepegawaian yang dibutuhkan. Dengan demikian, dengan adanya transformasi digital layanan kepegawaian, selain memberikan kemudahan dan mendorong aksesibilitas, juga transparansi informasi bagi pegawai, memonitor golongan/pangkat kepegawaian, input tugas-tugas dalam laporan kinerja harian, serta kehadiran yang berupa pengecekan hak (gaji) dan kewajiban kedatangan kantor pegawai.

Layanan pemerintahan pada Pemda di Indonesia semakin berkembang pasca penerapan SPBE sehingga layanan publik semakin berkembang dan memudahkan bagi ASN dalam memperoleh data dan informasi pribadi kepegawaian. Demikian pula dengan layanan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemda Kota Cirebon berupa layanan kepegawaian yang berbasis elektronik. Dalam penerapan SPBE tersebut, Pemda Kota Cirebon telah memiliki Perwali yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dijadikan pedoman menuju pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), baik dalam tata kelola maupun layanan publik.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Aplikasi *Mobile* Kepegawaian (SAMPEAN) merupakan *interface* atau *dashboard* yang berbasis *Android* dari Aplikasi SIMPEG, menampilkan informasi kepegawaian perorangan bagi ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Dalam pengembangannya, pengguna SAMPEAN adalah seluruh ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Karena hanya *dashboard* maka tidak ada level pengguna dalam SAMPEAN sehingga dapat memudahkan ketika lupa *password* yang diatur juga dalam aplikasi. Hal inilah yang menunjukkan adanya transformasi digital yang pada mulanya SIMPEG berupa layanan kepegawaian hanya dapat diakses oleh Admin, sekarang mengalami perluasan menjadi layanan publik dalam layanan administrasi pemerintahan. Menurut Westerman et al (2014) bahwa transformasi digital merupakan efek gabungan atas beberapa inovasi dan teknologi digital yang meliputi struktur, nilai, pengaturan, praktik, dan keyakinan baru yang dapat mengganti,

mengubah, atau melengkapi aturan yang sudah ada di dalam organisasi, industri maupun ekosistem (Tulungen et al., 2022).

Aplikasi SAMPEAN berbasis *Android* sehingga dapat diakses menggunakan *handphone* dan memudahkan ASN dalam menggunakannya. Aplikasi SAMPEAN dapat diunduh publik di *Google Play Store*. Aplikasi SAMPEAN semakin dikembangkan mengadopsi dari aplikasi-aplikasi lain yang di kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon seperti (a) Sistem Informasi manajemen Kepegawaian; (b) Sistem Kehadiran; dan (c) Sistem e-absensi.

Tujuan penggunaan aplikasi SAMPEAN bagi ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon antara lain (Bappelitbangda Kota Cirebon, 2022):

1. Meningkatkan Kinerja ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Dengan adanya Sampean diharapkan kinerja ASN lebih dapat ditingkatkan
2. Memberikan kemudahan kepada ASN dalam memantau absensi masing-masing pegawai. Aplikasi Sampean memiliki fitur absensi dimana bertujuan supaya pegawai dapat memantau kehadirannya masing- masing
3. Memberikan informasi kepada pegawai mengenai jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diperoleh selama sebulan. Aplikasi ini juga menampilkan fitur TPP diperoleh berdasarkan perhitungan absensi pegawai bertujuan sebagai kroscek jumlah TPP yang diterima pegawai
4. Memberikan informasi mengenai biodata pegawai meliputi: profil pegawai yang berisi data-data pegawai seperti pangkat dan jabatan
5. Memberikan kemudahan bagi pegawai mendownload dokumen kepegawaian yang dimiliki
6. Memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mencari informasi profil pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
7. Memberikan informasi berupa hasil monitoring atau pengecekan status sarana dan prasarana yang tersedia

Manfaat dengan adanya aplikasi SAMPEAN di lingkungan Pemda Kota Cirebon antara lain (Bappelitbangda Kota Cirebon, 2022):

1. Pemerintah daerah Kota Cirebon
 - a) Adanya kemudahan bagi Pemda Kota Cirebon dalam penghitungan TPP seluruh pegawai di lingkungan
 - b) Membantu bagi pimpinan/pejabat atas kebutuhan informasi dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian
2. Pegawai/ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon
 - a) Adanya kemudahan atas informasi kinerja dan pangkat/golongan kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon
 - b) Adanya kemudahan dalam memantau absensi harian
 - c) Adanya kemudahan informasi mengenai jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diperoleh selama sebulan
 - d) Adanya kemudahan informasi mengenai biodata pegawai meliputi: profil pegawai, pangkat, jabatan
 - e) Adanya kemudahan bagi ASN untuk mendownload dokumen kepegawaian yang dimiliki
 - f) Adanya kemudahan bagi ASN dalam mencari informasi profil pegawai lain di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
 - g) Adanya kemudahan informasi berupa hasil monitoring atau pengecekan status sarana dan prasarana yang tersedia

Pada awal pengembangannya tahun 2018, aplikasi SAMPEAN mempunyai 4 fitur antara lain ([Bappelitbangda Kota Cirebon, 2022](#)):

1. Biodata Pegawai; berisi Profil Pegawai, Pangkat dan Jabatan ASN yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh admin kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun fitur biodata berisi terdiri dari:
 - a) Biodata Pegawai: Nama, NIP, Pangkat Golongan, Nomor Karpeg, NIK, Nomor NPWP, Nomor BPJS, Nomor Karis/Karsu, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Alamat Domisili atau Tempat Tinggal, TMT CPNS, TMT PNS, Jabatan, Pendidikan, SKPD, Unit Es.III Es IV, dan Status Pegawai.
 - b) Pangkat: Berisi riwayat pangkat berupa tabel riwayat yang menampilkan: Pangkat, Golongan, TMT pangkat, No. SK Pangkat, Masa Kerja, Riwayat Pangkat dan Golongan disusun berurutan berdasarkan urutan waktu.
 - c) Jabatan: Berisi riwayat jabatan berupa daftar riwayat yang menampilkan: Nama Jabatan, TMT Jabatan, dan Unit Kerja.
2. Data Absensi; berisi absen harian pegawai dan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan absensi pegawai terdiri dari:
 - a) Absen: Berisi data absensi pegawai berbentuk tabel berisi: Tanggal Absen, Status Absen (datang/pulang), Keterangan Absen (terlambat/pulang cepat), Waktu Absen dan Keterangan.
 - b) TPP: Berisi data tunjangan yang akan diterima pegawai berdasarkan absensi yang merupakan hasil kinerja absensi pegawai. Bentuk data yang terdiri dari: Periode TPP, Besaran Tunjangan berdasarkan Perwal, Prosentase 40 Persen Tunjangan, Potongan-Potongan, Potongan Berdasarkan Kehadiran, Jumlah TPP Setelah Pemotongan, Pajak, dan TTP yang diterima.
3. Dokumen Pegawai; berisi dokumen kepegawaian dan dokumen pribadi pegawai berisi data-data dokumen kepegawaian milik pegawai yang dapat di *download* oleh pemilik akun. Aturan Dokumen: Dokumen Kepegawaian berbentuk PDF dengan besar *file* maksimal 1000kb, dan Dokumen Foto berbentuk JPEG dengan besaran *file* 1.000 kb.
4. Cari Pegawai; berisi pencarian pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

3.5. Transformasi Digital Aplikasi Layanan Kepegawaian menjadi Aplikasi Administrasi Pemerintahan

Salah satu fitur yang sering menjadi diskursus akademis mengenai layanan kepegawaian adalah fitur presensi secara elektronik maupun *online*. Secara kuantitatif, studi di Kabupaten Wajo menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan akan efektivitas penerapan absensi elektronik dengan disiplin kerja ASN ([Mamminanga, 2020](#)). Hasil studi secara kualitatif pun menunjukkan hasil yang serupa ([Arifin & Widiyarta, 2021](#); [Dahlan & Ariani, 2017](#); [Habibullah & Ferawati, 2022](#)) meskipun kedisiplinan pegawai tidak serta merta disempitkan maknanya hanya dari penerapan presensi elektronik ([Dahlan & Ariani, 2017](#)).

Seiring berjalannya waktu, ada permasalahan bagi pengguna di kalangan ASN di Pemda Kota Cirebon yaitu karena banyaknya aplikasi yang harus diakses untuk mendapatkan layanan kepegawaian. Untuk itu, Aplikasi SAMPEAN yang sebelumnya berfokus hanya pada layanan kepegawaian, pada tahun 2022 bertransformasi menjadi portal layanan administrasi pemerintahan. Portal layanan administrasi pemerintahan ini berupa gabungan dari aplikasi-aplikasi kepegawaian yang dikelola oleh BKPSDM serta aplikasi lain di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

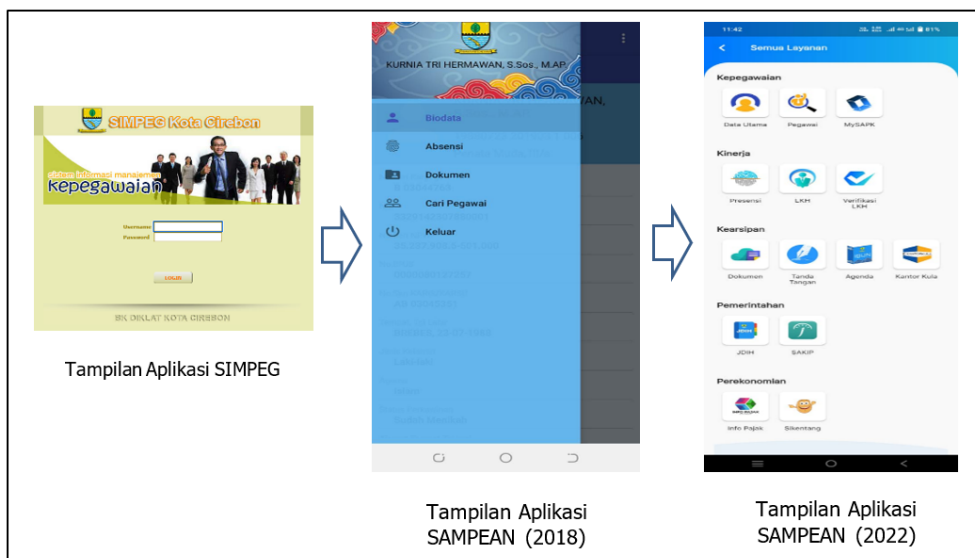
Seiring berjalannya waktu, ada permasalahan bagi pengguna di kalangan ASN di Pemda Kota Cirebon yaitu karena banyaknya aplikasi yang harus diakses untuk

mendapatkan layanan kepegawaian. Untuk itu, Aplikasi SAMPEAN yang sebelumnya berfokus hanya pada layanan kepegawaian, pada tahun 2022 bertransformasi menjadi portal layanan administrasi pemerintahan. Portal layanan administrasi pemerintahan ini berupa gabungan dari aplikasi-aplikasi kepegawaian yang dikelola oleh BKPSDM serta aplikasi lain di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Aplikasi SAMPEAN setelah menjadi Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan, didalamnya memiliki fitur-fitur tambahan maupun link aplikasi terkait pemerintahan Kota Cirebon antara lain (Bappelitbangda Kota Cirebon, 2022):

1. Menu Kepegawaian berisi Data Pegawai, Cari Pegawai, dan MySAPK BKN. MySAPK BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi seluler terkait database PNS dimana terintegrasi dan terhubung secara daring sebagai informasi Profil PNS
2. Menu Kinerja berisi presensi kehadiran pegawai melalui Absen *Barcode*, Informasi Jumlah TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), Laporan Kinerja Harian (LKH) Pegawai dan Verifikasi LKH oleh atasan
3. Menu Kearsipan berisi dokumen Pegawai, Tanda Tangan, Agenda Kegiatan Perangkat Daerah, dan e-KantorKula/E-Office. e-KantorKula singkatan dari Kerja Terintegrasi Tanpa Kertas dan ATK
4. Menu Pemerintahan berisi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
5. Menu Perekonomian berisi Info Pajak dan SiKentang (informasi kendaraan dinas)

Gambar 1 di atas menunjukkan perubahan *interface* atau *dashboard* layanan kepegawaian pada Pemda Kota Cirebon. Aplikasi SAMPEAN sejak terbentuk pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah berbasis *Android*. Untuk melihat transformasi digital layanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang dilihat dari perbandingan fitur layanan pada Tabel 1.



Gambar 1. Transformasi Digital Layanan Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Sumber: Data diolah oleh Tim Penulis

Tabel 1 menunjukkan perbedaan fitur-fitur yang dimiliki oleh SAMPEAN lama versi 2018 dan versi 2022 (terbaru). Dapat dilihat terdapat penambahan dan perluasan fungsi yang tersedia di mana pegawai tidak hanya dapat mengakses layanan kepegawaian, seperti data utama pribadi pegawai pemilik *account*, fitur cari pegawai lain, dan data tamhanan penghasilan pegawai, tetapi juga fitur-fitur tata kelola pemerintahan lainnya, seperti laporan kinerja harian, tanda tangan elektronik, e-office, hingga JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Aplikasi SAMPEAN memiliki fitur tidak hanya menu kepegawaian dan menu kinerja sebagaimana aplikasi layanan kepegawaian di daerah lain. Hal ini dikarenakan pada

Tabel 1. Perbandingan Fitur Aplikasi SAMPEAN 2018 dan 2022

Fitur	Sistem Aplikasi Mobile Kepegawaian (2018)	Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (2022)
Kepegawaian		
Data Utama Pegawai	✓	✓
Cari Pegawai	✓	✓
MySAPK BKN		✓
Kinerja		
Presensi Barcode		✓
Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai	✓	✓
Laporan Kerja Harian		✓
Verifikasi Laporan Kerja Harian		✓
Kearsipan		
Dokumen Pegawai	✓	✓
Tanda Tangan Elektronik		✓
ISUN (Agenda Kegiatan Perangkat Daerah)		✓
KANTORKULA (Kerja Terintegrasi Tanpa Kerjas Lan ATK/ E-Office)		✓
Pemerintahan		
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)		✓
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		✓
Perekonomian		
Info Pajak		✓
SiKentang (Informasi Kendaraan Plat Abang)		✓

Sumber: Data diolah oleh Tim Penulis

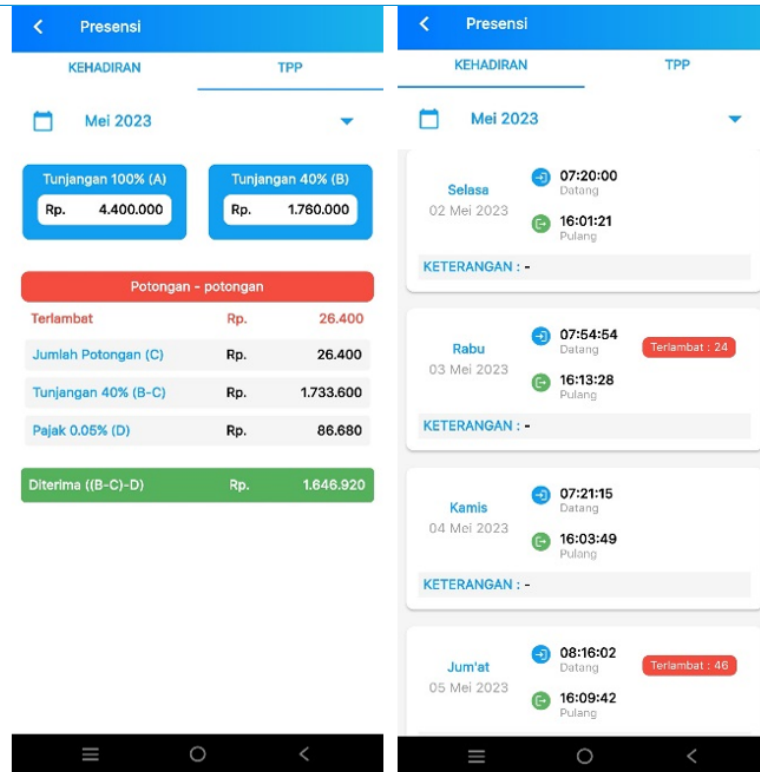
aplikasi SAMPEAN terdapat tambahan fitur menu kearsipan, menu pemerintahan dan menu perekonomian. Fitur-fitur yang ada di SAMPEAN baru memudahkan pengguna untuk mengakses banyak fitur administrasi pemerintahan hanya dari satu aplikasi, tidak dari berbagai aplikasi terpisah. Perluasan fitur ini menunjukkan bagaimana SAMPEAN lama bertransformasi menjadi SAMPEAN baru.

Ketentuan tunjangan kinerja berdasarkan Perwal Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan telah diubah menjadi Perwal Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2023 disebutkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terdiri dari 60% TPP Statis yang ditentukan dari jenjang jabatannya dan 40% TPP Dinamis yang ditentukan dari hasil kehadiran kerja harian ASN dan laporan kinerja harian (LKH). Pada aplikasi SAMPEAN, rincian TPP ASN pengguna sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan tampilan data presensi kehadiran salah seorang pengguna secara *real-time* dan akurat dari hari ke hari, dengan keterangan ditandai warna merah jika ASN tersebut telat hadir di kantor. Data presensi kemudian dikalkulasikan langsung terhadap TPP pengguna sesuai regulasi yang berlaku sehingga pengguna dapat melihat sendiri besaran potongan TPP atas keterlambatannya dan jumlah besaran TPP yang diterimanya.

Pengembangan layanan kepegawaian menjadi layanan administrasi pemerintahan secara lebih luas pada aplikasi SAMPEAN Cirebon, diharapkan tetap mengedepankan nilai-nilai dan manajemen ASN, peningkatan layanan publik serta kemampuan dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya pengelola. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi dalam bentuk infrastruktur saja, akan tetapi juga mengenai nilai, bagaimana pengoptimalan, serta kemampuan yang mengikuti keadaan dan dilakukan melalui penggunaan teknologi dan informasi (Firdaus et al., 2021).

Akses Aplikasi SAMPEAN Cirebon yang diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah menerapkan *Single Sign On* yang diartikan jadi hanya satu *Username* dan *Password* untuk semua aplikasi yang menjadi menu di aplikasi tersebut. Saat ini aplikasi SAMPEAN sudah diunduh lebih dari 5.000



Gambar 2. Menu Data Kehadiran dan TPP ASN pada Aplikasi SAMPEAN

Sumber: Data diolah oleh Tim Penulis

kali di Aplikasi *Play Store* dengan rating 3,8 (nilai maksimal 5) dan 87 ulasan baik berupa ulasan apresiasi, saran maupun keluhan dari para pengguna ASN aplikasi di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Dalam pemanfaatannya oleh ASN, aplikasi SAMPEAN sangat mudah dengan mengunduh pada aplikasi *Play Store* dan dilanjutkan instal pada perangkat HP berbasis *android*. Kemudahan informasi, proses layanan kepegawaian dan kecepatan informasi pemerintahan juga didapatkan oleh ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon. SAMPEAN saat ini sedang terus dikembangkan dengan menggunakan nama domain <https://sampean.go.id> sebagai portal informasi administrasi kepegawaian dalam *platform website*. Ke depan, informasi kepegawaian lainnya berupa kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dapat diintegrasikan pada aplikasi SAMPEAN tersebut. manajemen pemerintahan berbasis digital dalam layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan masih akan terus berkembang yang diharapkan SAMPEAN menjadi superapps informasi administrasi pemerintahan di Kota Cirebon.

4. Kesimpulan

Pemda Kota Cirebon berupaya untuk menyelenggarakan SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana kebijakan transformasi digital layanan kepegawaian di Kota Cirebon, mulai dari sistem manual, sistem elektronik terbatas, hingga sistem elektronik yang terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru.

Kebijakan transformasi digital layanan kepegawaian ini diperkuat dengan regulasi berupa Perwal Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Kepwal Kota Cirebon Nomor 100/Kep.404-DKIS/2022 tentang Penetapan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan Sebagai Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Terintegrasi. Berdasarkan dasar hukum tersebut, aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAMPEAN

diluncurkan untuk publik dan digunakan sebagai implementasi dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Sebelum adanya aplikasi SAMPEAN, ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon tidak dapat mengakses data kepegawaiannya sendiri. Selain itu, sistem presensi manual memberi peluang untuk kebocoran disiplin presensi dan kesulitan untuk menerapkan tunjangan kinerja berdasarkan presensi secara *real-time*, akurat, transparan, dan adil. Hanya administrator aplikasi SIMPEG yang dapat mengetahui seluruh profil pegawai.

Per tahun 2018, aplikasi SAMPEAN yang masih berfokus hanya pada kepegawaian muncul sebagai *dashboard* yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh ASN. Fitur yang muncul, yaitu 1) mengetahui profil ASN bersangkutan, 2) mengetahui profil singkat ASN lain, 3) mengetahui presensi pegawai bersangkutan, dan 4) mengetahui jumlah tunjangan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kinerja presensi. Dengan pengembangan kebutuhan akan kelengkapan aplikasi sekaligus penyederhanaan *platform*, maka pada tahun 2022 aplikasi SAMPEAN bertransformasi dengan menambah informasi layanan kepegawaian, kinerja, kearsipan dan pemerintahan. Transformasi digital dalam layanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap mengedepankan pada nilai-nilai manajemen ASN serta kemampuan baik infrastruktur teknologi maupun sumber daya pengelola.

Terdapat rekomendasi yang telah dihasilkan atas studi ini yaitu bahwa dalam suatu transformasi digital atas layanan administrasi kepegawaian, perlu tetap didukung oleh regulasi kebijakan yang kuat, baik dalam perumusan maupun implementasinya. Selain itu pentingnya *maintenance*, pengembangan, replikasi atas aplikasi SAMPEAN di masa mendatang serta digitalisasi layanan kepegawaian sebagai salah satu dukungan dalam mewujudkan penerapan SPBE di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dengan memberikan informasi dan data dalam penyelesaian penelitian, penyusunan artikel, sampai dengan artikel ini terpublikasi.

REFERENSI

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*. Pustaka Setia.
- Arifin, M., & Widiyarta, A. (2021). Efektifitas Absensi Online dalam Disiplin Kerja di Kantor Imigrasi Khusus TPI Surabaya Saat Pandemi Covid-19. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 35–57. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3277>
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. (2022). *Laporan Teknis Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon Tahun 2022*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth)*. Sage.
- Dahlan, M., & Ariani, R. (2017). Efektivitas Absensi Elektronik Terhadap Disiplin dan Kinerja PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Balitbangda Kab. Kukar*, 11(1), 19–29.
- Erni Yanti Telaumbanua, F., Lase, D., & Waruwu, S. (2022). Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian. *JAMANE: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 320–326. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.49>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Stdui Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Habibullah, A., & Ferawati, D. (2022). Government to Employees: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian (SINOK) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintahan Kota Tegal. *Jurnal AGREGASI (Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi)*, 10(2), 120–135. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.8013>
- Haryono, H., Isharyanto, I., & Firdaus, S. U. (2018). Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On-Line Untuk Mewujudkan e-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 160–169. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18366>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). *Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2024*. https://perpus.menpan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NDE4YzRiZTk4ZGRmYjQxZDYyODZjMDM3ZjNmNDY2ZWRIWmNmM4ZQ==.pdf
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019). *Menciptakan Smart ASN Menuju Birokrasi 4.0*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menciptakan-smart-asn-menuju-birokrasi-4-0>

- Khaeromah, S., Yuliani, F., & As'ari, H. (2021). Digitalisasi Birokrasi Melalui Pembangunan Smart ASN di Kantor Regional XXI BKN Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 140–158.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Policy, Analysis, and Alternatives (Sixth)*. CQ Press.
- Kurniawan, R., Djaenuri, A., Prabowo, H., & Lukman, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN Ditinjau dari Aspek Perencanaan, Perekrutan dan Pengembangan Kompetensi di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Jurnal Papatung*, 3(3), 104–116.
- Mamminanga, I. (2020). Pengaruh Efektifitas Penerapan Absensi Elektronik Sidik Jari Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2(1), 11–23.
- Mardesah, M., & Zainal, R. I. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. *MBIA*, 20(2), 123–140. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1408>
- Maulana, R. Y. (2022). Collabotive Digital Transformation Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Noken*, 7(2), 263–277.
- Nopriani, & Rodin, R. (2020). Konservasi Naskah Manuskrip Sebagai Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Era Industri 4.0. *J U P I T E R*, 17(1), 20–29. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/11311>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Putri, N. I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. *ATrABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 1–15. <http://jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/600>
- Putri, O. A., & Hariyanti, S. (2022). Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen. *Proceedings of Islamic Economics ...*, 1(1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/229%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/download/229/176>
- Ramadia, I. (2022). *Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Saputra, D. (2018). The Effect of Employee's Administrative Service to Civil Servant Satisfaction in Local Apparatus Agency at South Kalimantan Province. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(3), 21–41.
- Saputra, T., Pebriana, M., & Wasiah, S. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(1), 10–17.
- Sirajuddin, S. N., & Lestari, V. S. (2019). Livestock ecology research on institution and traditional sharing systems in cattle farms. *EurAsian Journal of BioSciences*. <https://search.proquest.com/openview/9ebef5755d78f53d55bef4b2a986836e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2042720>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method) (Kedua)*. Alfabeta.
- Suharno, S., Elmas, M. S. H., & Priantono, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja (Studi Pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 8(2), 60–67. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v8i2.611>
- Suparto, D., & Habibullah, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Penyebaran Informasi dalam Pelayanan Publik. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 161–172. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.8013>
- Telaumbanua, S., Zega, Y. K., Nehe, L., & ... (2020). *Tema-Tema Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen*. repository.uki.ac.id. <http://repository.uki.ac.id/8605/1/BukuTemaTemaPerjanjianLama.pdf>
- Tulungen, E. E., Maramis, J. B., & Saerang, D. P. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1116–1123.